

MATA KULIAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

“Penugasan Portofolio”

(Menganalisis 3 Artikel, 3 Jurnal Nasional, 2 Jurnal Internasional dan 1 Laporan Keuangan
Akuntansi Sektor Publik)

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia S.E., M.Si., M.S.AK. AK. C.A
3. Fiarika Dwi Utari S.Pd., M.Pd



Disusun Oleh:

Kelompok 7

Dia Ravikasari	2313031067
Dela Zulia Pratiwi	2313031079

**PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ARTIKEL 1

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya Untuk Penilaian Akuntabilitas Serta Kinerja Pemerintah Daerah
Nama Penulis : Fadilatul Jannah, dan Yedida Cahya A. P.
Tahun Terbit : 2022
Tanggal Akses : 23 November 2023

B. Deskripsi Artikel

1. Pendahuluan

Pelaporan keuangan sektor publik mencerminkan penerapan regulasi transparan untuk pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pemerintah, mendukung *good governance*. Tujuannya adalah memberikan dasar keputusan bagi pemakai informasi seperti masyarakat, pemerintah, lembaga audit, dan pihak terlibat dalam investasi. Sesuai UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur. Sebagai entitas kompleks, sektor publik memerlukan informasi beragam untuk manajemen, perencanaan, dan pengendalian. Akuntan sektor publik berperan penting menyediakan informasi internal dan eksternal, termasuk penyusunan laporan keuangan untuk akuntabilitas publik. Laporan keuangan melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi untuk evaluasi kinerja. Kinerja keuangan PT. Cipta Daya Nusantara Manado pada 2010-2012, meskipun likuiditas stabil, menghadapi masalah manajemen kas dan penurunan profitabilitas, meningkatkan risiko bangkrut.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dan deskriptif analisis. Laporan keuangan mencatat informasi perusahaan terkait data keuangan pada periode tertentu, dengan persyaratan bahwa informasi tersebut harus membuktikan fakta sebenarnya. Laporan keuangan berperan penting dalam membentuk akuntabilitas sektor publik dan menunjukkan kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah memengaruhi keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pihak internal pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai alat penilaian kinerja. Sistem informasi akuntansi keuangan publik yang efisien diperlukan untuk menyusun pelaporan keuangan sektor publik yang akurat.

3. Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan sektor publik mencatat posisi keuangan transaksi pada entitas tersebut dan menjadi elemen kunci untuk membentuk akuntabilitas. Fungsinya meliputi deskripsi keadaan perusahaan, evaluasi kinerja, referensi keputusan, dan gambaran kredibilitas. Tujuannya adalah menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang digunakan oleh berbagai pemakai, termasuk kreditor, supplier, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan yang baik dapat memengaruhi keputusan ekonomi, membangun kepercayaan, dan memberikan informasi perkembangan perusahaan.

C. Kesimpulan

Laporan keuangan memiliki peran kunci dalam membentuk akuntabilitas sektor publik dan sebagai indikator kinerja keuangan, baik bagi pemerintah maupun swasta. Akuntansi Sektor publik berperan penting dalam menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas publik. Secara internal, laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi dan manajemen. Sementara secara eksternal, laporan keuangan digunakan sebagai sarana penjelasan dan dasar pengambilan keputusan.

D. Sumber Artikel

Putri, Y. C. A. P., & Jannah, F. (2022). ANALISA LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA UNTUK PENILAIAN AKUNTABILITAS SERTA KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 2(1), 26-33.

ARTIKEL 2

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Nama Penulis : Sayuti Sayuti, Jamaluddin Majid, dan Muhammad Sapril Sardi Juardi

Tahun Terbit : 2018

Tanggal Akses : 23 November 2023

B. Deskripsi Artikel

1. Pendahuluan

Akuntabilitas dan transparansi adalah kunci penting dalam mencapai *good governance*, terutama dalam pengelolaan anggaran sektor publik yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat. Sektor publik sering dianggap sebagai sumber pemborosan dan kebocoran dana, mendorong kebutuhan untuk mengedepankan *value for money*. Ini melibatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam manajemen organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2002). Penerapan akuntansi yang baik dan pengawasan optimal pada laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Auditya (2013) mengindikasikan bahwa pengukuran kinerja pemerintah memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Diperlukan manajemen kinerja yang efektif untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang fokus pada deskripsi dan analisis kegiatan, proses, atau peristiwa penting dalam kehidupan sosial, dengan pengukuran data berdasarkan pandangan sementara yang dibentuk secara spesifik, sesuai dengan paradigma kualitatif untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.

3. Hasil dan Pembahasan

Transparansi merupakan kewajiban pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan daerah bertujuan memberikan informasi keuangan yang berguna

untuk keputusan ekonomi, sosial politik, dan akuntabilitas. Transparansi informasi, khususnya keuangan dan fiskal, harus dilakukan secara relevan dan mudah dipahami, mencegah penyimpangan tindakan aparatur publik. Akuntabilitas publik keuangan daerah melibatkan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan, memenuhi hak-hak publik. Sistem anggaran daerah perlu berorientasi pada kinerja, mendukung akuntabilitas publik dalam konteks otonomi dan desentralisasi, dengan karakteristik yang mencakup kepentingan publik, pengelolaan yang efisien, transparansi, dan pendekatan kinerja.

C. Kesimpulan

Berdasarkan artikel, perwujudan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BAPPEDA telah baik, termanifestasi dalam keterbukaan informasi dan partisipasi pemangku kepentingan. Penerapan konsep *value for money* juga terlihat dalam sebagian besar program kerja, dengan mayoritas program berjalan ekonomis, efisien, dan efektif sesuai target yang diinginkan.

D. Sumber Artikel

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-28.

ARTIKEL 3

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik
Nama Penulis : Rendalia Putri, Agus Sutarjo, dan Desmiwerita
Tahun Terbit : 2023
Tanggal Akses : 23 November 2023

B. Deskripsi Artikel

1. Pendahuluan

Akuntansi sektor publik di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengalami perkembangan pesat dalam waktu singkat. Akuntabilitas publik menjadi fokus utama untuk mencapai good governance. Meskipun terdapat upaya penerapan akuntansi berbasis akrual, evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan kategori cukup. Masalah aksesibilitas laporan keuangan dan lemahnya pengawasan internal menjadi hambatan dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas, penelitian dilakukan pada Badan dan Dinas OPD di Kabupaten Agam.

2. Metode

Metode pengumpulan data merupakan langkah esensial dalam penelitian untuk memperoleh dan menginvestigasi informasi. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, diambil langsung dari responden pegawai pemerintah Kabupaten Agam melalui penyebaran kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T untuk variabel independen secara parsial dan uji Fisher untuk pengujian hipotesis secara serempak. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 24.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis, variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Hal ini dibuktikan melalui uji T dan uji F, serta pemenuhan karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Hasil penelitian mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa

penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan fungsional berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat daerah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada badan dan dinas di Pemerintah Kabupaten Agam. Kesimpulan ini didukung oleh uji T dan uji F yang menunjukkan dampak yang signifikan baik secara individual maupun simultan. Oleh karena itu, penyampaian laporan keuangan daerah menjadi upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Agam.

D. Sumber Artikel

Putri, R., Sutarjo, A., & Desmiwerita, D. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik. *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(2), 162-173.

JURNAL NASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Nomor	: 1
Volume	: 5
Halaman	: 52-63
Tahun Terbit	: 2013
Judul Jurnal	: PENGARUH PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA SEKTOR PUBLIK
Nama Penulis	: Taufeni Taufik & Dian Kemala

B. Isi Jurnal

Jurnal dengan judul Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern, dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik pada pemerintah kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Dengan demikian seorang yang memahami *good corporate governance*, diikuti dengan pengendalian intern yang baik serta mempunyai komitmen (loyalitas) yang tinggi terhadap organisasinya maka kinerja sektor publik tersebut diharapkan menjadi lebih baik. *Good governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Komitmen Organisasi Definisikan sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam organisasi. Hal ini merefleksikan sikap individu akan tetap sebagai anggota organisasi yang ditunjukkan dengan kerja kerasnya. Kinerja sektor publik merupakan bagian dari perekonomian nasional yang dikendalikan oleh pemerintah. Bagian dari perekonomian ini berkaitan dengan pemberian atau penyerahan jasa atas jasa pemerintah kepada publik.

C. Kesimpulan

Setelah membaca jurnal tersebut dapat diketahui Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap komitmen organisasi baik secara simultan maupun parsial. Untuk pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern juga ditemukan pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Sedangkan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja sektor publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. Sumber Jurnal

Taufik, Taufeni; Kemala, Dian. 2013. Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/1481/1457>

JURNAL NASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Nomor : 2
Volume : 12
Halaman : 25-54
Tahun Terbit : 2019
Judul Jurnal : PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE
Nama Penulis : Eka Nurmala Sari

B. Isi Jurnal

Jurnal ini disusun dengan peneritian yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap *Good Governance* Pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Medan. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap *good governance*. Keberhasilan penerapan *good governance* tidak terlepas dari pengaruh faktor intenal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem makna atau sistem nilai bersama yang ada di dalam suatu organisasi. budaya organisasi perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi pemersatu dan pemacu gerak langkah anggota organisasi. Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya *good governance* disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya organisasi. Akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini sedang berjalan. Kaitannya dengan reformasi sektor publik, otonomi daerah menjadi salah satu bagian dari reformasi sektor publik itu sendiri. Otonomi memberikan keleluasaan (diskresi) pada daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara luas. Budaya organisasi dapat membentuk tindakan manajer dan pengambilan keputusan, termasuk pilihan sistem kontrol. budaya organisasi mempengaruhi perilaku pekerja untuk efektivitas praktek akuntansi, seperti, integrasi informasi keuangan, pembentukan pelaporan, diseminasi laporan keuangan, informasi akuntansi dapat dipercaya. Akuntansi sektor

publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Domain publik di sini antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

C. Kesimpulan

Setelah membaca jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan besaran pengaruh termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa . budaya organisasi memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. 2. Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*. Besarnya variasi dari variabel *good governance* yang dapat dijelaskan oleh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik adalah sebesar 23,3 %, sedangkan sisanya sebesar 76,7 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini.

D. Daftar Pustaka

Nurmala Sari, Eka. 2019. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/144/89>

JURNAL NASIONAL 3

A. Identitas Jurnal

Nomor : 2
Volume : 11
Halaman : 18-27
Tahun Terbit : 2017
Judul Jurnal : PERSEPSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Nama Penulis : Kariyoto

B. Isi Jurnal

Jurnal ini disusun bertujuan untuk Tujuan penulisan artikel ini menjelaskan pemahaman atau persepsi yang benar tentang akuntansi sektor publik. Tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik yang dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industri nasional perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, perusahaan publik. Namun kata tersebut dirasa kurang tepat, sehingga frase pemerintah yang berkuasa masih menjadi perdebatan kontroversial dalam konteks demokrasi yang menyatakan bahwa rakyatlah yang paling berkuasa. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya perlu dilakukan. Salah satu alasan yang amat substantial adalah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik. aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam. Sebagai contoh, mulai dibukanya sektor public berkompetisi dalam mekanisme pasar yang paling nyata, yaitu privatisasi, telah menyebabkan kebutuhan utama seperti gas, listrik, air, dan kepemilikan publik dilepaskan ke swasta (tetapi publik yang mengatur). Praktik akuntansi sudah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia. Faktor akuntabilitas amat penting dalam dari penjelasan di atas, pengelolaan dana masyarakat. Praktik pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam konteks visi kesejahteraan masyarakat. Ini berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan masyarakat sangat menentukan perkembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP). proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, dan politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan mengubah arah

pengembangan organisasi akuntansi, Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan logis untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik. pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, dan politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi, Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan logis untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik.

C. Kesimpulan

Tingginya pengaruh politik di Indonesia terhadap sistem Organisasi, Sterling (2004) berpendapat bahwa hampir semua masalah praktis yang dihadapi dalam praktik akuntansi bisa dipecahkan dengan teori. Hipotesis dari investigator mengarahkan bahwa karena pajak, politik, dan pertimbangan kebijakan, manajer dari perusahaan besar memilih standar akuntansi, karena laporan pendapatan harus dikurangi. Manajemen cemas bahwa pendapatan yang besar akan mengundang pemerintah untuk melakukan intervensi langsung.

D. Daftar Pustaka

Kariyoto. 2017. PERSEPSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=jurnal+nasional+akuntansi+sektor+publik&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1672582885326&u=%23p%3D2IW04_BVA_EgJ

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

PENGARUH AUDIT KINERJA APARATUR PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA

Maya Widyana Dewi, Nisa Budianti

Program Studi Akuntansi STIE-AAS Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Perilaku aparatur pemerintah yang baik akan berdampak pada kualitas pelayanan. Untuk itu perlu adanya evaluasi kinerja dari aparatur pemerintah melalui audit kinerja. Penelitian ini menitikberatkan pada variabel kinerja aparatur pemerintah yang dilihat dari 3 (tiga) aspek/faktor yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja dan ketepatan waktu. Selanjutnya akan diketahui kinerja aparatur pemerintah publik sudah efektif atau belum dalam pelaksanaannya melalui audit kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

- a) Pengaruh kualitas audit terhadap hasil pekerjaan, kuantitas pekerjaan audit dan ketepatan waktu audit terhadap kualitas pelayanan publik secara parsial;
- b) Pengaruh audit mutu terhadap hasil kerja, kuantitas audit hasil kerja dan ketepatan waktu audit mutu pelayanan publik secara simultan;
- c) Variabel audit kinerja manakah yang paling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Banjarsari.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Audit kualitas hasil kerja dan audit ketepatan waktu berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelayanan publik, sedangkan audit kuantitas pekerjaan tidak; Apabila pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka kinerja aparatur terwujud secara optimal mulai dari sikap aparaturnya dan kesiapan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemeriksaan terhadap kuantitas pekerjaan tidak terlepas dari standar pelayanan minimal baik dari segi fisik, jumlah aparatur yang memberikan pelayanan, maupun jumlah infrastruktur yang memadai. Ketepatan waktu menuntut kedisiplinan aparatur dalam kesiapannya memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah mempunyai nilai tambah sehingga tercipta kualitas pelayanan prima

- b) Audit kualitas hasil kerja, audit kuantitas pekerjaan dan audit ketepatan waktu secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik; Semakin baik pelayanan yang dilakukan baik dari sikap, sarana dan prasarana yang semakin memadai serta pengelolaan waktu kinerja yang tepat akan berdampak baik pada peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur Kabupaten Banjarsari.
- c) Variabel audit kinerja yang paling berpengaruh adalah audit kualitas kerja

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KOMITMEN DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT

Dinar Irfani Sodik, Hadi Samanto, Sri Laksmi Pardanawati

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, yang merupakan salah satu ciri good governance sebagai tujuan dari pemberdayaan aparatur negara. Selain dari kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat juga dapat diperoleh dari segi komitmen aparatur pemerintah. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya faktor pendukung lainnya, kualitas sistem informasi akuntansi misalnya. Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan komponen dalam perusahaan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, mengkomunikasikan dan informasi keuangan dan membuat keputusan yang relevan dengan pihak eksternal dan pihak internal perusahaan.

Desain penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Instrumen tes dianalisis menggunakan uji deskriptif, uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik dianalisis menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan uji determinasi (R^2).

Setelah dilakukannya pengolahan data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a) Variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar 1,200 adalah 1,660 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi $0,233 > 0,05$, sehingga hipotesis pertama (H_1) dan H_0 diterima.
- b) Variabel komitmen tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar -0,970 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,660, dengan taraf signifikan $0,334 > 0,05$, sehingga hipotesis kedua pada (H_2) ditolak dan (H_0) diterima.

- c) Variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar 15,547 lebih besar dari t tabel sebesar 1,660, dengan tingkat signifikansi $> 0,05$ ditolak.

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
AUDITED

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	TA 2020			REALISASI 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	6.092.766.638.277,00	5.718.339.699.615,49	93,85	6.645.538.871.169,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	3.434.785.985.000,00	3.069.474.217.923,49	89,36	4.023.156.314.134,59
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	2.989.347.879.808,48	2.607.990.396.693,00	87,24	3.463.996.393.584,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	26.452.745.700,00	18.966.859.393,00	71,70	33.841.782.964,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	177.452.629.542,00	177.395.020.194,90	99,97	171.076.247.197,42
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	241.532.729.949,52	265.121.941.642,59	109,77	354.241.890.389,17
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.652.272.653.277,00	2.643.157.481.688,00	99,64	2.616.498.279.035,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	2.573.470.371.277,00	2.564.355.199.688,00	99,65	2.548.063.873.035,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	78.802.282.000,00	78.802.282.000,00	100,00	68.434.406.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	100,00	5.884.278.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	100,00	5.884.278.000,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	5.251.655.208.641,20	4.916.723.387.079,43	93,62	4.403.625.560.597,87
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	4.385.912.048.817,52	4.123.413.143.305,30	94,01	3.845.688.340.311,65
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.708.556.108.836,52	1.597.686.826.900,68	93,51	1.590.611.064.913,75
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.642.708.046.021,00	1.553.627.778.078,12	94,58	1.195.894.560.327,09
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	5.000.000.000,00	4.936.000.000,00	98,72	9.903.628.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	1.025.447.893.960,00	963.383.053.326,50	93,94	1.040.184.587.070,81
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.200.000.000,00	3.779.485.000,00	89,98	9.094.500.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	481.297.502.589,00	458.448.887.065,83	95,25	556.754.502.359,04
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	276.511.338.316,00	265.771.890.897,00	96,12	63.506.862.123,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	115.324.807.779,00	110.121.074.839,69	95,49	236.359.501.621,14
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	62.241.529.223,00	59.374.343.153,60	95,39	128.335.018.713,06
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	21.368.682.995,00	17.984.051.037,54	84,16	117.877.559.353,84
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.851.144.276,00	5.197.527.138,00	88,83	10.675.560.548,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	384.445.657.234,68	334.861.356.708,30	87,10	1.182.717.927,18
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	384.445.657.234,68	334.861.356.708,30	87,10	1.182.717.927,18
TRANSFER DAERAH	5.1.3	1.672.926.957.084,45	1.441.398.088.184,18	86,16	2.114.688.305.724,54
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	1.268.007.845.434,45	1.054.748.783.171,60	83,18	1.302.125.715.639,33
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	1.268.007.845.434,45	1.054.748.783.171,60	83,18	1.302.125.715.639,33
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	404.919.111.650,00	386.649.305.012,58	95,49	812.562.590.085,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	263.272.398.050,00	246.157.706.212,58	93,50	330.260.987.829,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	136.377.000.000,00	135.221.885.200,00	99,15	479.795.535.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	5.269.713.600,00	5.269.713.600,00	100,00	2.506.067.256,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		6.924.582.165.725,65	6.358.121.475.263,61	91,82	6.518.313.866.322,41
SURPLUS/DEFISIT		(831.815.527.448,65)	(639.781.775.648,12)	76,91	127.225.004.847,18
PEMBIAYAAN	5.1.4	831.815.527.448,65	832.637.635.863,48	100,10	704.590.522.601,47
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	831.815.527.448,65	832.637.635.863,48	100,10	704.590.522.601,47
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	831.815.527.448,65	831.863.603.723,48	100,01	702.345.385.366,47
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		-	774.032.140,00	-	2.245.137.235,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	-	-	-	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)		-	192.855.860.215,36	-	831.815.527.448,65

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


 GUBERNUR BALI

 WAYAN KOSTER

PEMERINTAH PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
AUDITED

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
ASET	5.2.1	10.515.561.974.477,17	10.880.737.340.756,59
ASET LANCAR	5.2.1.1	375.703.308.559,43	1.016.403.425.383,22
Kas dan Setara Kas	5.2.1.1.1	191.594.109.904,54	831.411.352.968,02
Kas di Kas Daerah	5.2.1.1.1.1	60.445.286.323,08	650.647.578.852,66
Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.1.1.1.2	-	13.286.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.1.1.1.3	-	6.187.328,00
Kas di BLUD	5.2.1.1.1.4	78.954.565.099,81	135.968.551.038,96
Kas Lainnya di Bendahara BOS	5.2.1.1.1.5	52.194.258.481,65	44.775.749.748,40
Setara Kas	5.2.1.1.1.6	-	-
Piutang	5.2.1.1.2	98.698.011.588,71	98.088.383.167,94
Piutang Pajak	5.2.1.1.2.1	27.168.286.627,00	37.295.600.983,00
Piutang Retribusi	5.2.1.1.2.2	153.220.000,00	129.039.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.2.3	951.680.759,73	951.680.759,73
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.1.2.4	65.293.716.530,16	55.378.195.175,16
Piutang Lainnya	5.2.1.1.2.5	5.131.107.671,82	4.333.867.250,05
Penyisihan Piutang	5.2.1.1.3	(41.604.264.211,76)	(34.690.843.968,72)
Penyisihan Piutang Pajak	5.2.1.1.3.1	(329.275.992,14)	(371.211.000,92)
Penyisihan Piutang Retribusi	5.2.1.1.3.2	(68.722.150,00)	(36.468.015,00)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.3.3	(951.680.759,70)	(951.680.759,70)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.1.3.4	(36.019.107.263,10)	(29.403.229.280,15)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.2.1.1.3.5	(4.235.478.046,82)	(3.928.254.912,95)
Beban Dibayar dimuka	5.2.1.1.4	412.064.314,43	112.197.260,27
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka	5.2.1.1.4.1	412.064.314,43	112.197.260,27
Persediaan	5.2.1.1.5	126.603.386.963,51	121.482.335.955,71
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.2.1.1.5.1	24.200.298.928,14	19.413.626.729,97
Persediaan Bahan/Material	5.2.1.1.5.2	44.142.549.893,10	36.691.339.759,58
Persediaan Barang Lainnya	5.2.1.1.5.3	58.260.538.142,27	65.377.369.466,16
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.2.1.2	1.373.168.127.148,48	1.373.777.524.568,76
Investasi Non Permanen	5.2.1.2.1	-	774.032.140,00
Dana Bergulir	5.2.1.2.1.1	-	774.032.140,00
Investasi Permanen	5.2.1.2.2	1.373.168.127.148,48	1.373.003.492.428,76
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.1.2.2.1	1.373.168.127.148,48	1.373.003.492.428,76
ASET TETAP	5.2.1.3	7.896.043.889.759,65	7.743.629.861.228,57
Aset Tetap Tanah	5.2.1.3.1	4.543.910.245.603,19	4.166.232.536.186,23
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.2.1.3.2	1.689.371.955.634,83	1.600.892.532.185,69
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.2.1.3.3	2.234.184.022.217,84	2.170.807.551.558,85
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.3.4	2.951.716.071.415,07	2.940.133.070.386,02
Aset Tetap Lainnya	5.2.1.3.5	48.818.604.458,25	63.719.411.785,25
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.2.1.3.6	21.711.749.703,80	21.598.209.957,17
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.2.1.3.7	(3.593.668.759.273,33)	(3.219.753.450.830,64)
ASET LAINNYA	5.2.1.4	870.646.649.009,61	746.926.529.576,05
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.2.1.4.1	706.637.729.710,53	593.288.127.933,53
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.4.2	13.315.142.767,65	12.328.266.365,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.2.1.4.3	(7.971.487.342,00)	(6.289.862.588,00)
Aset Lain - Lain	5.2.1.4.4	158.665.263.873,43	147.599.997.865,52
KEWAJIBAN	5.2.2	160.015.626.310,79	168.312.600.949,02
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	160.015.626.310,79	168.312.600.949,02
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.2.2.1.1	-	22.509.092,34
Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.1.2	17.074.334.451,56	18.824.792.711,97
Utang Belanja dan Transfer	5.2.2.1.3	139.135.945.622,57	144.744.414.087,57
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.1.4	3.805.346.236,66	4.720.885.057,14
EKUITAS		10.355.546.348.165,34	10.712.424.739.808,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.515.561.974.476,19	10.880.737.340.757,62

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk laporan realisasi anggaran dan neraca. Berikut adalah analisis dari data yang tersedia.

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan dan Belanja

- Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp21,65 triliun, yang mencapai 91,65% dari target APBD. Namun, ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4,67 triliun atau 17,74% dibandingkan dengan tahun 2019.
- Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan signifikan sebesar Rp3,27 triliun (26,58%) akibat dampak pandemi COVID-19. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi kontributor terbesar dengan Rp11,94 triliun (55,16%).

2. Defisit Fiskal

Realisasi belanja daerah pada tahun 2020 mencapai Rp20,89 triliun atau 96,67% dari pagu anggaran. Hal ini mengakibatkan defisit fiskal sebesar Rp10,20 triliun, yang merupakan 203,19% dari target defisit yang ditetapkan.

3. Kinerja Ekonomi

Perekonomian Bali mengalami kontraksi sebesar 9,31% pada tahun 2020. PDRB per kapita menurun dari Rp58,14 juta di tahun 2019 menjadi Rp51,18 juta di tahun 2020.

B. Neraca Keuangan

1. Posisi Keuangan

Neraca per 31 Desember 2020 menunjukkan total aset dan kewajiban yang mencerminkan posisi keuangan pemerintah daerah. Kewajiban meningkat seiring dengan penurunan pendapatan dan belanja yang tidak seimbang.

2. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kemiskinan meningkat dari 3,61% di tahun 2019 menjadi 4,45% di tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka juga meningkat menjadi 5,63%, dibandingkan dengan 1,57% di tahun sebelumnya.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar 75,50, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (75,38), menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas hidup meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 menunjukkan tantangan besar akibat dampak pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan dan peningkatan kewajiban menciptakan defisit fiskal yang signifikan. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator kesejahteraan seperti IPM, tantangan dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah ke depan.